



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

L A P O R A N
DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGHADIRI SOUTHEAST ASIAN PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION
(SEAPAC) EXECUTIVE COMMITTEE MEETING AND REGIONAL DISCUSSION
“FOSTERING REGIONAL COMMITMENT ON ENVIRONMENTAL DEMOCRACY
TO ADDRESS GREEN CORRUPTION.”

Bali, 21-23 Mei 2024

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada 27-28 Februari 2023, *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) - organisasi yang memayungi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara dalam bidang anti korupsi, telah menggelar konferensi di Jakarta, yang membahas peran anggota parlemen dalam memastikan akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan yang menyangkut lingkungan dan akses terhadap keadilan dalam isu lingkungan untuk memerangi korupsi hijau/lingkungan hidup.

Selama ini korupsi di bidang ekstraktif seringkali terabaikan dan studi mengenai pengelolaan sumber daya alam serta korupsi lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh *Basel Institute* menunjukkan adanya *green paradox*. Di satu sisi, korupsi lingkungan menjadi isu yang begitu mendapat perhatian, namun kerusakan lingkungan menjadi sesuatu yang bisa ditolerir ketika manfaat ekonomi yang dihasilkannya dianggap lebih menguntungkan dari degradasi lingkungan.

Konferensi SEAPAC pada 2023 lalu menjadi platform bagi Anggota Parlemen ASEAN untuk mengekplorasi solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan kegiatan diskusi regional SEAPAC saat ini mencoba untuk memperluas cakupan diskusi dan mengidentifikasi berbagai pandangan yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam menghadapi isu lingkungan dan *green corruption*. Bekerja sama dengan SEAPAC dan *Westminter Foundation for Democracy* (WFD), DPR RI menyelenggarakan diskusi regional yang

mengusung tema “*Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption*”.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Sidang Komite Eksekutif SEAPAC dan memiliki 2 (dua) fokus pembahasan, yaitu:

1. Demokrasi Lingkungan sebagai penggerak reformasi anti-korupsi

Di tahun 2010, di mana sebuah tonggak sejarah dicapai dalam bidang hukum lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ketika Sesi Khusus *United Nations Environmental Program* (UNEP) *Governing Council* dan *the Global Ministerial Environment Forum* di Bali, mengadopsi secara penuh, Pedoman Pengembangan Legislasi Nasional atas Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pembuatan Keputusan dan Akses atas Keadilan terhadap Persoalan Lingkungan (*the Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Matters*). Dokumen bersejarah yang dihasilkan, yang disebut *Bali Guidelines*, merepresentasikan kerangka kerja utama untuk implementasi global perihal tiga hak prosedural yang merupakan pilar demokrasi lingkungan sejalan dengan Principle 10 Deklarasi Rio tahun 1992 mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Kawasan Pan-Europa dan Amerika Latin serta Karibia telah mengambil langkah dengan mengadopsi instrumen hukum internasional dalam penerapan Principle 10 Deklarasi Rio, melalui Konvensi Aarhus dan Perjanjian *Escazú Agreement* secara berurutan. di ASEAN sendiri, perlu ada upaya kolektif untuk memajukan dialog tingkat tinggi untuk memperkuat komitmen hak asasi lingkungan hidup dan mengupayakan konsensus dalam kerangka kerja kawasan.

Pada sesi ini, para ahli akan mengontekstualisasikan demokrasi lingkungan hidup, menarik benang merahnya dengan isu penanganan korupsi hijau/lingkungan, dan mendiskusikan peran anggota parlemen dalam mengangkat isu tersebut di parlemen masing-masing.

2. Pengarusutamaan kerangka kerja demokrasi lingkungan hidup di ASEAN untuk menyelesaikan korupsi hijau/lingkungan hidup.

Sejak peluncuran *Bali Guidelines*, inisiatif untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan hidup di ASEAN menghadapi tantangan kurangnya fokus dan keberlanjutan strategi. Di tahun 2015, *the World Resources Institute* (WRI) merilis indeks Demokrasi Lingkungan Hidup. Namun, upaya untuk meningkatkan indeks sebagai instrumen kawasan

yang bisa diterapkan secara reguler, aktual, penilaian komprehensif perihal kemajuan yang dicapai dalam penerapan *Bali Guidelines* di negara-negara ASEAN masih terbilang minim.

Pada kuartal pertama tahun 2024, WFD menugaskan Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan (PolGov), Universitas Gadjah Mada, untuk melakukan sebuah studi untuk menjembatani kesenjangan yang nyata dalam analisis yang komprehensif dan terintegrasi yang fokus pada penerapan *Bali Guidelines* di negara-negara ASEAN. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi perkembangan terkini yang dipimpin oleh *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) untuk mempersiapkan kerangka kerja hak lingkungan hidup ASEAN, dengan harapan tentatif bahwa kerangka ini akan segera diadopsi oleh para pemimpin ASEAN.

Sesi ini akan diakhiri dengan lokakarya mini mengenai Praktik Terbaik Parlemen dan Pembelajaran tentang Penerapan Prinsip Demokrasi Lingkungan yang didalamnya, Anggota SEAPAC dapat bertukar pandangan berdasarkan pandangan dan pengalaman negara masing-masing.

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI menghadiri *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion: “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”* pada tanggal 21-23 Mei 2024 di Bali berdasarkan:

1. Hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP ke-43 tanggal ... yang menyetujui pengiriman Delegasi DPR RI ke *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion: “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”*.
2. Disposisi Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan dengan Nomor Agenda 291 tanggal 3 Mei 2024 perihal persetujuan pelaksanaan pengiriman Delegasi DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Disposisi Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan dengan Nomor Index 36/Korinbang/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal persetujuan pelaksanaan pengiriman Delegasi DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Tugas Nomor 12/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/05/2024 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri *the SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”*.

C. SUSUNAN DELEGASI DPR RI

Susunan Delegasi DPR RI pada *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”* terdiri dari:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc | Ketua BKSAP/Ketua Delegasi/F-PGerindra (A-086)/ Komisi I |
| 2. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.LM | Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PDIP (A-179)/ Komisi III |
| 3. Putu Supadma Rudana, MBA | Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PD (A-563)/ Komisi VI |
| 4. Dr. H. Sukamta | Wakil Ketua BKSAP/ Anggota Delegasi/F-PKS (A-445) /Komisi I |
| 5. Ir. H. Achmad Hafisz Thohir | Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PAN (A-487)/Komisi XI |
| 6. Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos.
MCOMN&MEDIAST | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PDIP (A-262) /Komisi V |
| 7. Paramitta Widya Kusuma, SE | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PDIP (A-198)/Komisi VII |
| 8. Drs. H. Darul Siska | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PGolkar (A-271)/Komisi IX |
| 9. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PGerindra (A-078)/Komisi X |
| 10. Dr. Hj. Arzeti Bilbina, M.A.P. | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PKB (A-32)/Komisi IX |
| 11. Muslim, S.HI., M.M | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PD (A-523)/Komisi VI |
| 12. Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si. | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PAN (A-492/Komisi VII |
| 13. Rojih | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PPP (A-466)/Komisi I |
| 14. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng | Anggota BKSAP/ Anggota Delegasi/ F-PKS (A-422)/Komisi II |

D. MAKSUD DAN TUJUAN PARTISIPASI DELEGASI

Maksud partisipasi Delegasi DPR RI ke *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”* pada tanggal 21-23 Mei 2024 di Bali yaitu:

- 1) Berpartisipasi dalam seluruh rangkaian pertemuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman terkait isu-isu demokrasi lingkungan hidup dan hubungan antara kualitas demokrasi dengan korupsi, khususnya dalam sektor lingkungan hidup.
- 2) Menyampaikan berbagai masukan terhadap kerangka kerja kawasan dalam memperkuat institusi demokrasi dan sesuai dengan posisi dan memperjuangkan reformasi legislasi sesuai kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia.
- 3) Mendukung kebijakan nasional dalam implementasi *Bali Guidelines* dalam rangka penguatan demokrasi lingkungan hidup dan kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi hijau/lingkungan hidup.

Adapun tujuan partisipasi Delegasi DPR RI ke *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”* pada tanggal 21-23 Mei 2024 di Bali yaitu:

- 1) Memanfaatkan pertemuan untuk menjalin hubungan regional yang baik dengan parlemen kawasan Asia Tenggara.
- 2) Memperkuat eksistensi dan kontribusi Indonesia dalam perumusan aksi konkret di kawasan dalam pengarusutamaan kerangka kerja demokrasi lingkungan hidup di ASEAN untuk menyelesaikan korupsi hijau/lingkungan.
- 3) Menegaskan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya untuk menegakkan demokrasi di kawasan, utamanya di sektor lingkungan hidup, dengan mendorong peran dan partisipasi aktif parlemen.
- 4) Melaksanakan peran diplomasi parlemen sebagai salah satu unsur penting *total diplomacy* dalam rangka mendukung pendekatan multi-sektor untuk mengatasi berbagai permasalahan kawasan, sejalan dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional RI.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan pada masa persiapan partisipasi Delegasi DPR RI ke *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion*

“Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”, baik dari segi teknis maupun dari sisi substansi.

Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP bekerjasama dengan SEAPAC dan WFD menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi keikutsertaan Delegasi dalam kedua pertemuan. Sementara dari sisi substansi, Sekretariat bersama Tenaga Ahli telah menyusun materi paparan dan *Point of Intervention*.

F. ANGGARAN

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”* ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2024.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA PERTEMUAN

SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption” diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan
Tuesday, 21 May 2024	
Delegates arrival	
Wednesday, 22 May 2024	
08.30 – 09.00	Registration
09.00 – 10.30	Executive Committee Meeting (Members only) Venue: Denpasar Room (in camera)

13.30 – 13.45	<p>Opening</p> <ul style="list-style-type: none"> • John Hyde – Secretary of GOPAC • Hon. Dr. Fadli Zon, MP – President of SEAPAC <p><i>Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform.</i></p> <p>Moderator: Dr. Sukamta</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafael Jimenez Aybar – Environmental Democracy Adviser, WFD • Juhani Grossmann – Green Corruption Team Leader, Basel Institute on Governance • Hon. Mardani Ali Sera, MP – Member of Legislative Committee, Indonesian House of Representatives <p>Question and Answers</p>
12.30 – 13.30	Lunch Break
13.30 – 15.30	<p><i>Mainstreaming Environmental Democracy Framework in ASEAN to Address Green Corruption.</i></p> <p>Moderator: Dr. Abdul Gaffar Karim – Head of the Politics and Government</p> <p>Department, Universitas Gadjah Mada</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Amalinda Savirani & Dr. Indah Surya Wardani – Research Centre for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada • Putu Ardana – Dalem Tamblingan Indigenous Community • Juan Bordera Roma – Climate Journalist & Activist <p>Parliament Good Practices and Lesson Learned on the</p>

	<p>Implementation of Environmental Democracy Principles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brunei Darussalam • Cambodia • Indonesia • Lao PDR • Malaysia • The Philippines • Singapore • Thailand • Timor Leste • Viet Nam
15.30 – 16.00	Wrap up session
18.30	<p>Dinner Hosted by President of SEAPAC, Hon. Dr. Fadli Zon, MP</p> <p>Venue: beachfront</p>
Thursday, 23 May 2024	
Delegates Departure	

B. SITUASI UMUM PERTEMUAN

1. Executive Committee Meeting

Pertemuan berlangsung pada hari Selasa, 22 Mei 2024 pada pukul 09.00 WITA. Pertemuan dihadiri oleh Anggota SEAPAC yang terdiri dari perwakilan 5 (lima) Parlemen ASEAN (AIPA) atau berjumlah orang. Pertemuan dilakukan secara tertutup dan dipimpin oleh Presiden *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC), Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc sebagai Ketua Sidang Komite Eksekutif dan Sekretaris *Global Organization Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) sekaligus tuan rumah.

Opening

Acara dibuka oleh *Master Ceremony* (MC), pada pukul 10.30 WITA dan dihadiri oleh sejumlah...partisipan yang terdiri dari Anggota SEAPAC, Para Panelis dan undangan dari Sekretariat GOPAC, SEAPAC, *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), Basel *Institute on Governance*, Universitas Gadjah Mada, Aktivis dan Jurnalis Iklim, Ndalem Tamblingan

Indigenous Community dan Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

MC selanjutnya mempersilakan **John Hyde**, Sekretaris SEAPAC untuk menyampaikan *opening remarks*. Selanjutnya, MC mempersilakan, **Dr. Fadli Zon**, selaku Presiden SEAPAC dan Wakil Ketua GOPAC untuk menyampaikan pidato sekaligus membuka acara.

2. Regional Discussion

Sesi *Regional Discussion* dimulai pukul 13.30 WITA. MC selanjutnya menyerahkan acara kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi yang terbagi ke dalam 2 (dua) fokus tema pembahasan, yaitu *Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform* dan *Mainstreaming environmental democracy framework in ASEAN to address green corruption*.

A. Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform

Sesi Diskusi pertama dengan tema bahasan *Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform* dimoderatori oleh **Dr. Sukamta**, Anggota SEAPAC sekaligus Wakil Ketua Bada Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya memimpin jalannya diskusi.

Sesi Diskusi I diisi oleh 3 (tiga) orang panelis. Panelis pertama, **Rafael Jimenez Aybar**, *Environmental Democracy Adviser WFD*, Panelis kedua, **Juhani Grossmann**, *Green Corruption Team Leader Basel Institute on Governance* dan Panelis ketiga, **Dr. Mardani Ali Sera**, Anggota Badan Legislasi DPR RI.

B. Mainstreaming Environmental Democracy Framework in ASEAN to Address Green Corruption

Sesi Diskusi kedua dengan tema bahasan *Mainstreaming Environmental Democracy Framework in ASEAN to Address Green Corruption* dimoderatori oleh **Dr. Abdul Gaffar Karim**, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya memimpin jalannya diskusi.

Sesi Diskusi II diisi oleh 4 (empat) orang panelis. Hadir sebagai panelis pertama dan kedua dari Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, **Dr. Amalinda Savirani** dan **Dr. Indah Surya Wardan**, Panelis kedua, Dr. Indah Surya Wardan, Panelis ketiga, **Putu**

Ardana, *Dalem Tamblingan Indigenous Community* dan Panelis keempat, **Juan Bordera Roma**, Aktivis dan Jurnalis Iklim.

3. Wrap Up Session

Pertemuan ditutup dengan sesi finalisasi pada pukul 15.30 WITA. Turut menyampaikan *summary*, Presiden SEAPAC sekaligus Wakil Ketua GOPAC, Dr. Fadli Zon.

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR-RI

1. Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform

Pertemuan berlangsung pada hari Selasa, 22 Mei 2024 pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.30 WIB. Mewakili Indonesia, Delegasi DPR RI yang hadir adalah Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.LM (F-PDIP), Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD), Dr. H. Sukamta (F-PKS), Ir. H. Achmad Hafisz Thohir (F-PAN), Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, MCOMN&MEDIAST (F-PDIP), Paramitta Widya Kusuma, SE (F-PDIP), Drs. H. Darul Siska (F-PGolkar), Hj. Himmatal Aliyah, S.Sos., M.Si (F-PGerindra), Dr. Hj. Arzeti Bilbina, M.A.P (F-PKB), Muslim, S.HI., M.M (F-PD), Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si (F-PAN), Rojih (F-PPP), dan Anggota Baleg, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.En (F-PKS).

2. Mainstreaming Environmental Democracy Framework in ASEAN to Address Green Corruption.

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Mei 2024 pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Mewakili Indonesia, Delegasi DPR RI yang hadir adalah Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.LM (F-PDIP), Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD), Dr. H. Sukamta (F-PKS), Ir. H. Achmad Hafisz Thohir (F-PAN), Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, MCOMN&MEDIAST (F-PDIP), Paramitta Widya Kusuma, SE (F-PDIP), Drs. H. Darul Siska (F-PGolkar), Hj. Himmatal Aliyah, S.Sos., M.Si (F-PGerindra), Dr. Hj. Arzeti Bilbina, M.A.P (F-PKB), Muslim, S.HI., M.M (F-PD), Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si (F-PAN), Rojih (F-PPP), dan Anggota Baleg, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.En (F-PKS). Pertemuan dimoderatori oleh Ghafar Abdul Karim, Kepala Departmen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

C. **Closing Session**

Acara ditutup pada hari Selasa, 22 Mei 2024 pukul 15.30 WITA dengan sesi *Wrap Up* di mana Presiden SEAPAC sekaligus Wakil Ketua GOPAC, Dr. Fadli Zon menyampaikan *final statemen*.

III. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption” yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 23 Mei 2024 di Bali secara *hybrid* ini menghasilkan *Report* yang dirilis oleh *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) dan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD).

IV. PENUTUP

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi pada *SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”* dapat tercapai dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) dan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) sebagai penyelenggara acara sehingga Delegasi DPR RI dapat mengelaborasi dan menyuarakan gagasan-gagasan mengenai demokrasi lingkungan hidup dan korelasinya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi hijau/lingkungan bersama partisipan lainnya dari kawasan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat dan Tenaga Ahli sebagai *supporting system* yang telah memberikan dukungan teknis maupun substansi sehingga partisipasi Delegasi DPR RI dapat berjalan optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai rekam jejak partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam pertemuan lintas parlemen dan pemangku kepentingan terkait di kawasan. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam pertemuan serupa lainnya di masa mendatang.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil pertemuan sebagai berikut:

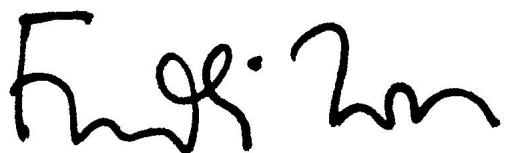
- *Report of SEAPAC Executive Committee Meeting and Regional Discussion “Fostering Regional Commitment on Environmental Democracy to Address Green Corruption”*
- Materi Presentasi Panelis dalam sesi:
 - a. *Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform*
 - b. *Mainstreaming Environmental Democracy Framework in ASEAN to Address Green Corruption*
- *Suggested Point of Intervention mengenai Environmental Democracy as a Driver of Anti-Corruption Reform*
- *Suggested Point of Intervention mengenai Mainstreaming Environmental Democracy Framework in ASEAN to Address Green Corruption*
- Dokumentasi foto
- Publikasi media sosial

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 23 Mei 2024

a.n. Delegasi

Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

A-086